

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD																										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK																										
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026																										
No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			82.203.960.000		11.765.825.098		15.474.080.073		3.110.663.056		3.393.616.511						6.504.279.567		6.504.279.567	20,08	7,91		
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			73.937.611.000		10.588.944.138		13.337.375.616		2.923.953.300		3.082.948.944						6.006.902.244		6.006.902.244	21,58	8,12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya capaian sasaran program	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	500		100		100		23,82		25,11						48,93		48,93		9,79			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			680.000.000		58.958.083		43.861.600		19.984.150		16.074.498						36.058.648		36.058.648	5	5,3		
			Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara sistematis dan terukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		2		2		1		0					1		1		10				
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			375.000.000		38.233.483		30.481.800		16.981.400		12.380.598						29.361.998		29.361.998	0	7,83		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			305.000.000		20.724.600		13.379.800		3.002.750		3.693.900						6.696.650		6.696.650	10	2,2		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		2		2		1		0					1		1		10				
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			51.519.999.999		7.596.232.569		8.622.777.858		2.259.154.944		2.359.053.659						4.618.208.603		4.618.208.603	55,75	8,96		
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67		67		53		68		68					68		68		101,49				
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10				
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			51.329.999.999		7.581.131.468		8.609.133.458		2.255.963.944		2.355.802.039						4.611.765.983		4.611.765.983	101,49	8,98		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67		67		53		68		68					68		68		101,49				
		2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			190.000.000		15.101.101		13.644.400		3.191.000		3.251.620						6.442.620		6.442.620	10	3,39		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10				
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			566.000.000		23.950.000		264.580.000		99.590.000		1.200.000						100.790.000		100.790.000	69,75	17,81		
			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	119		83		83		83		83					83		83		69,75				
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			566.000.000		23.950.000		264.580.000		99.590.000		1.200.000						100.790.000		100.790.000	69,75	17,81		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	119		83		83		83		83					83		83		69,75				
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.910.077.751		373.063.717		2.121.468.858		129.693.938		260.183.294						389.877.232		389.877.232	16,11	9,97		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
								I		II		III		IV		13	14 = 13			15=14/6 x100%						
								9	10	11	12	13	14 = 13	15=14/6 x100%												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		0					1		1		20				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		5		10		2		6					8		8		16				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		3		0					3		3		20				
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0					1		1		10				
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		5		5		4		0					4		4		16				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	325		2		65		15		20					35		35		10,77				
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		1					1		1		20				
	2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			352.241.500		40.226.180		36.174.200		7.335.713		7.693.466					15.029.179		15.029.179	20	4,27			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		0					1		1		20				
	2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.133.240.400		97.256.196		170.288.000		14.403.357		107.934.000					122.337.357		122.337.357	16	10,8			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		5		10		2		6					8		8		16				
	2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			264.600.000		57.828.765		52.920.000		10.000.000		17.948.784					27.948.784		27.948.784	20	10,56			
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		3		0					3		3		20				
	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			212.734.500		39.855.796		42.546.900		17.395.365		-					17.395.365		17.395.365	10	8,18			
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0					1		1		10				
	2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			40.170.800		6.350.000		6.723.600		6.000.000		-					6.000.000		6.000.000	16	14,94			
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		5		5		4		0					4		4		16				
	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			501.145.515		24.433.200		1.142.080.658		45.969.700		94.463.600					140.433.300		140.433.300	10,77	28,02			
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	325		2		65		15		20					35		35		10,77				
	2.18.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.405.945.036		107.113.580		670.735.500		28.589.803		32.143.444					60.733.247		60.733.247	20	4,32			
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		1					1		1		20				
	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.257.179.000		1.533.165.856		1.706.173.600		357.976.148		407.853.913					765.830.061		765.830.061	10	6,8			
			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10				
	2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			38.791.000		1.500.000		1.958.200		600.000		500.000					1.100.000		1.100.000	10	2,84			
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3					6		6		10				
	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.718.388.000		343.602.728		448.034.400		75.648.662		79.043.273					154.691.935		154.691.935	10	3,28			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10			
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.500.000.000		1.188.063.128		1.256.181.000		281.727.486		328.310.640					610.038.126		610.038.126		10	9,39		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		6		10			
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.004.354.250		1.003.573.913		578.513.700		57.554.120		38.583.580					96.137.700		96.137.700		19,87	1,6		
			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1		1				1		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65		13		13		1		4				5		5		7,69					
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25		5		5		0		0				0		0		0					
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		6		6		2		1				3		3		10					
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	65		1		0		1		0				1		1		1,54					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		5		13		0		0				0		0		0					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		3		5		5		0				5		5		0					
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			211.850.000		40.154.148		38.556.700		19.974.920		9.877.010					29.851.930		29.851.930		100	14,09		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1	1	1	1		1		1				1		1		100				
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			316.051.750		83.112.448		61.292.000		11.931.000		19.816.570					31.747.570		31.747.570		7,69	10,05		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65		13	13	1	4		1		4				5		5		7,69				
		2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				27.776.000		1.995.000		2.380.800		-		-				-		-		0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25		5	5	0	0		0		0				0		0		0				
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				287.985.000		36.990.000		40.858.900		19.948.200		8.890.000				28.838.200		28.838.200		10	10,01		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		6	6	2	1		2		1				3		3		10				
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.040.733.500		-		-		-		-				-		-		1,54	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	65		1	0	1	0		1		0				1		1		1,54				
		2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				119.958.000		824.063.517		425.304.000		-		-				-		-		0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		5	13	0	0		0		0				0		0		0				
		2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		17.258.800		10.121.300		5.700.000		-				5.700.000		5.700.000		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		3		5		5		0						5		5		0								
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1.186.532.000		218.298.700		678.759.343		4.624.800		53.743.100						58.367.900		58.367.900	0	4,92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
			Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif	Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah ()	65		76,7		65		0		0						0		0		0								
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	4,7		6,32		4,5		4,91		4,91								4,91		4,91						104,47		
				Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	10		44,36		6		0		0								0		0						0		0
				Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	80		147,75		80		0		0								0		0						0		0
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			588.144.000		78.643.000		144.696.543		3.532.300		16.187.500						19.719.800		19.719.800	0	3,35							
			Meningkatnya daya tarik investasi melalui pemeberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0								
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		38		1		0		0								0		0						0		
				Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	5		1		1		0		0								0		0						0		
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			275.000.000		18.880.500		5.581.000		-		4.000.000						4.000.000		4.000.000	0	1,45							
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0								
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			138.801.294		-		45.286.009		2.464.800		10.085.000						12.549.800		12.549.800	0	9,04							
			Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		38		1		0		0						0		0		0								
		2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			174.342.706		59.762.500		93.829.534		1.067.500		2.102.500						3.170.000		3.170.000	0	1,82							
			Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0								
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			598.388.000		139.655.700		534.062.800		1.092.500		37.555.600						38.648.100		38.648.100	0	6,46							
			Tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif, informatif dan berbasis data	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0								
				Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	5		1		1		0		0								0		0						0		
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		1		1		0		0								0		0						0		
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		32.277.450		182.810.000		-		19.530.500						19.530.500		19.530.500	0	7,81							
			Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0								
		2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			98.388.000		7.034.000		16.848.200		-		2.840.700						2.840.700		2.840.700	0	2,89							

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	5		1		1		0		0					0		0		0				
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			250.000.000		100.344.250		334.404.600		1.092.500		15.184.400					16.276.900		16.276.900	0	6,51			
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		1		1		0		0					0		0		0				
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			2.094.447.000		227.601.500		511.702.800		101.342.500		84.635.175					185.977.675		185.977.675	10	8,88	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Meningkatnya promosi penanaman modal secara terarah, informatif dan kolaboratif mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal (%)	5		30,43		5		14,29		28,57					28,57		28,57		571,4				
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.094.447.000		227.601.500		511.702.800		101.342.500		84.635.175					185.977.675		185.977.675	10	8,88			
			Terselenggaranya promosi investasi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		1		0					1		1		20				
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1.824.738.229		224.670.900		480.087.600		101.342.500		71.497.800					172.840.300		172.840.300	20	9,47			
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		1		0					1		1		20				
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			269.708.771		2.930.600		31.615.200		-		13.137.375					13.137.375		13.137.375	0	4,87			
			Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0					0		0		0				
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			4.170.330.000		553.749.509		662.433.814		36.375.656		102.822.098					139.197.754		139.197.754	35,7	3,34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/NIB/ persetujuan/ surat pernyataan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	75		92,89		75		97,96		99,29					99,29		99,29		132,39				
				Persentase Penyelesaian Ijin (%)	100		447,04		100		759,3		1701					1.701		1.701		1701				
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			4.170.330.000		553.749.509		662.433.814		36.375.656		102.822.098					139.197.754		139.197.754	35,7	3,34			
			Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50		8		10		3		3					6		6		12				
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10000		22.312		2000		3.669		5.579					9.248		9.248		92,48				
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	60		22		10		8		7					15		15		25				
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	60		6		10		0		8					8		8		13,33				
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			568.590.317		36.852.100		54.543.200		8.318.000		18.722.400					27.040.400		27.040.400	12	4,76			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket	
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50		8		10		3		3						6		6		12					
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1.548.493.689		143.885.497		200.358.000		9.088.156		33.368.200							42.456.356		42.456.356	92,48	2,74				
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10000		22.312		2000		3.669		5.579							9.248		9.248		92,48				
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		1.805.196.994		356.539.112		395.332.614		18.969.500		48.291.598							67.261.098		67.261.098	25	3,73				
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	60		22		10		8		7							15		15		25				
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		248.049.000		16.472.800		12.200.000		-		2.439.900							2.439.900		2.439.900	13,33	0,98				
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	60		6		10		0		8							8		8		13,33				
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		739.889.000		165.904.850		280.704.000		43.590.800		68.691.194							112.281.994		112.281.994	28,92	15,18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
		Meningkatnya kepatuhan perusahaan	Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LPKM (%)	60		57,48		30		48		55						55		55		91,67						
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	90		92,6		90		100		100						100		100		111,11						
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		739.889.000		165.904.850		280.704.000		43.590.800		68.691.194						112.281.994		112.281.994	28,92	15,18					
			Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib dan berkelanjutan di daerah	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	100		12		20		6		28						34		34		34					
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1760		336		320		115		227						342		342		19,43						
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	150		44		125		11		39						50		50		33,33						
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		214.889.000		11.014.900		31.490.000		6.772.500		7.803.498							14.575.998		14.575.998	34	6,78				
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	100		12		20		6		28							34		34		34				
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		265.000.000		87.021.050		131.270.000		27.172.300		40.506.496							67.678.796		67.678.796	19,43	25,54				

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket	
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	1760		336		320		115		227						342		342		19,43					
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			260.000.000		67.868.900		117.944.000		9.646.000		20.381.200						30.027.200		30.027.200	33,33	11,55				
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	150		44		125		11		39						50		50		33,33					
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			75.151.000		11.326.400		3.104.500		776.000		776.000					1.552.000		1.552.000	40	2,07	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
			Terkelolanya data dab informasi perizinan dan non perizinan	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2		0,092		2		1,73		0,35					0,35		0,35		17,5						
				Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal (Indeks)	5		0		5		5		5					5		5		100						
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75.151.000		11.326.400		3.104.500		776.000		776.000					1.552.000		1.552.000	40	2,07					
			Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi, akurat dan termanfaatkan secara optimal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	10		2		2		2		2					4		4		40						
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			75.151.000		11.326.400		3.104.500		776.000		776.000					1.552.000		1.552.000	40	2,07					
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	10		2		2		2		2					4		4		40						
JUMLAH						82.203.960.000		11.765.825.098		15.474.080.073		3.110.663.056		3.393.616.511					6.504.279.567		6.504.279.567							
Rata-rata capaian kinerja (%)																						20,08	7,91					
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Implementasi pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Banyak perusahaan besar yang telah merealisasikan investasinya di tahun sebelumnya dan sudah berada di tahap komisioning sehingga realisasi investasi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya 2. Pada tahun 2026 ini belum terdapat proyek berskala besar yang terealisasi secara optimal																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar seluruh tambahan investasi (perluasan usaha, pembelian mesin, pembangunan fasilitas baru, dan penambahan modal) dicatat dan dilaporkan secara benar melalui LKPM 2. Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi kepada calon investor pada sektor-sektor unggulan daerah 3. Merumuskan kembali target investasi yang sesuai dengan kondisi 2 tahun ke belakang dimana realisasi investasi mengalami penurunan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya : - 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Status Indikator Menjadi Positif) - 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (Status Indikator Menjadi Positif) - 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Target Kinerja P-RKPD 2026 Menjadi 68 Orang/Bulan Sesuai Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN) - 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Status Indikator Menjadi Kumulatif)" - 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Status Indikator Menjadi Kumulatif) 2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Status Indikator Menjadi Kumulatif) - 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Status Indikator Menjadi Positif) - 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Tidak Ada Anggaran 2026) - 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Status Indikator Menjadi Kumulatif) - 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Status Indikator Menjadi Kumulatif; Target Kinerja P-RKPD 2026 Menjadi 8 Dokumen Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan)																												